

RESPON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI KAMPANYE MELANESIAN RENAISSANCE OLEH VANUATU YANG TERJADI DI PROVINSI PAPUA

Abdul Aziz Hibatullah Ramadhan¹, Khairur Rizki², Mahmududdin³, Lalu Puttrawandi Karjaya⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

azizramadhamnn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by the Indonesian government in responding to the Melanesian Renaissance Campaign by Vanuatu in Papua Province. The separatist movement in Papua, Indonesia, which began with the 1962 New York Agreement and the 1969 Act of Free Choice, poses a threat to the country's territorial sovereignty. Vanuatu, a member of the Melanesian Spearhead Group (MSG), supports an independent Papua and promotes the Melanesian Renaissance, resulting in a decline in support for the Indonesian central government. Vanuatu has also criticised Indonesia at international forums over human rights violations in Papua. Indonesia, the largest Melanesian population in the Pacific, joined the MSG as an associate member. The conflict in Papua involves complex political, cultural, economic and human rights issues and requires long-term solutions through cooperation between all relevant parties. The type of research used by researchers in this study is descriptive research, the research approach used in this study is qualitative. Vanuatu's Melanesian Renaissance campaign supports Papuan independence, influences diplomacy, raises awareness, and shares views in Papua. The Indonesian government responded with infrastructure, autonomy, education, health, economy, and diplomacy measures. The author suggests that Indonesia should promote more consistent and active diplomacy, and draw closer to Vanuatu and the pro-independence Papuan people to achieve more positive results on the issue of the Melanesian Renaissance campaign.

Keywords: *Melanesian Renaissance, Human Rights, Separatism, Vanuatu*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon Kampanye *Melanesian Renaissance* oleh Vanuatu di Provinsi Papua. Gerakan separatisme di Papua, Indonesia, yang bermula sejak Perjanjian New York 1962 dan Pepera 1969, menjadi ancaman bagi kedaulatan teritorial negara. Vanuatu, anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG), mendukung Papua Merdeka dan mempromosikan *Melanesian Renaissance*, yang berdampak pada penurunan dukungan terhadap pemerintah pusat Indonesia. Vanuatu juga telah mengkritik Indonesia di forum internasional terkait pelanggaran HAM di Papua. Indonesia, yang memiliki populasi Melanesia terbesar di Pasifik, bergabung dengan MSG sebagai *associate member*. Konflik di Papua melibatkan isu politik, budaya, ekonomi, dan HAM yang kompleks dan memerlukan solusi jangka panjang melalui kerja sama antara semua pihak terkait. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kampanye *Melanesian Renaissance* Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua, mempengaruhi diplomasi, meningkatkan kesadaran, dan membagi pandangan di Papua. Pemerintah Indonesia merespons dengan langkah-langkah infrastruktur, otonomi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan diplomasi. Penulis menyarankan agar Indonesia meningkatkan diplomasi yang lebih konsisten dan aktif, serta mendekatkan diri kepada Vanuatu dan masyarakat Papua pro-merdeka untuk mencapai hasil yang lebih positif dalam isu kampanye *Melanesian Renaissance*.

Kata Kunci: *Melanesian Renaissance, HAM, Separatis, Vanuatu*

PENDAHULUAN

Gerakan separatisme di Papua adalah salah satu ancaman utama terhadap kedaulatan Indonesia, karena mengganggu masalah teritorial dan menyiratkan potensi pemisahan wilayah. Gerakan ini memperjuangkan pemisahan wilayah Papua, yang saat itu terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Munculnya gerakan ini sebagian besar berakar dalam rasa ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap penanganan berbagai isu oleh pemerintah pusat, termasuk isu hak asasi manusia, eksploitasi sumber daya alam, dan ketegangan budaya serta identitas. Sebagai akibatnya, beberapa kelompok separatisme Papua memperjuangkan pemisahan dari Indonesia dan pembentukan negara mereka sendiri, yang dikenal sebagai Papua Barat. Sejarah penggabungan wilayah Papua dengan Indonesia dimulai dengan penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda di wilayah tersebut dan menyerahkan Papua kepada PBB. Kemudian, pada tahun 1969, dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai etnis di Papua. Hasil Pepera menghasilkan suara mayoritas untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, kelompok separatisme Papua mengklaim bahwa Pepera dan Perjanjian New York memiliki "cacat hukum" karena tidak mengikuti prinsip satu orang satu suara, melainkan melalui sistem perwakilan yang menurut mereka tidak memenuhi standar internasional. Seiring berjalannya waktu, gerakan separatisme Papua semakin berkembang, menjadi lebih solid dan terorganisir. Mereka berjuang untuk pemisahan Papua dari Indonesia dan mendirikan negara mereka sendiri, Papua Barat. (Redaksi CNN Indonesia, 2019) Konflik Papua menjadi semakin kompleks karena melibatkan sejumlah aspek, seperti perselisihan sejarah status wilayah, ketegangan budaya dan identitas, eksploitasi sumber daya alam, serta isu hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk mencapai perdamaian dengan memberikan otonomi khusus kepada Papua, namun upaya mediasi dan dialog masih terus berlangsung. Konflik ini masih berlanjut, dan mencapai solusi jangka panjang akan memerlukan kerja sama antara semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks Kepulauan Pasifik, khususnya di negara-negara Melanesia, tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman terhadap orang asli Papua telah memicu kekhawatiran yang signifikan. Ini terutama disebabkan oleh pandangan bahwa orang asli Papua adalah bagian dari etnis Melanesia yang memiliki hubungan budaya yang kuat dengan masyarakat Melanesia lainnya di kawasan ini. Masyarakat Melanesia tradisional memiliki ikatan sosial dan budaya yang melampaui batas-batas negara. Salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang telah menentang kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang asli Papua adalah Vanuatu. Vanuatu memainkan peran kunci dalam mendukung Gerakan Papua Merdeka dan kampanye *Melanesian Renaissance*. Vanuatu adalah anggota dari *Melanesian Spearhead Group* (MSG), sebuah organisasi subregional di Pasifik Selatan yang dibentuk oleh negara-negara berlatar belakang etnis Melanesia. (Cain, 2015) MSG bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan negara-negara Melanesia Pasifik, mengembangkan identitas dan persatuan etnis, mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan antarnegara, serta meningkatkan tata kelola, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022) Negara-negara anggota MSG termasuk Timor Leste, Papua Nugini, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, dan Fiji, dengan total populasi sekitar 9 juta orang etnis Melanesia. Indonesia sebelumnya hanya menjadi pengamat di MSG, namun karena memiliki populasi etnis Melanesia terbesar di Pasifik dengan hampir 13 juta orang,

Indonesia berhasil menjadi anggota asosiasi di MSG. Namun, kerja sama regional ini tidak selalu berjalan mulus, terutama karena berbagai perbedaan pendekatan antara Indonesia dan negara-negara Melanesia lainnya terkait isu Papua. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022)

Vanuatu memiliki peranan penting dalam mendukung Gerakan Papua Merdeka melalui *Melanesian Renaissance*. Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Hayde Lini, mempopulerkan gagasan *Melanesian Socialism*, yang menggabungkan nilai-nilai budaya Melanesia dengan perlawanan terhadap kapitalisme dan pembangunan ekonomi yang berbasis rakyat. Dia juga menyatakan bahwa "Vanuatu tidak akan sepenuhnya merdeka sampai semua bangsa Melanesia merdeka." Gagasan ini menjadi moto Vanuatu dan motivasi untuk mendukung kemerdekaan berbagai wilayah yang dihuni oleh etnis Melanesia. Vanuatu sangat vokal dalam mendukung Gerakan Papua Merdeka. (Premdas, n.d.) Mereka memfasilitasi pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dan menggunakan persamaan etnis (*Melanesian Brotherhood*) sebagai alasan untuk mendukung kampanye politik Papua Merdeka. Selain itu, Vanuatu juga memanfaatkan organisasi subregional Pasifik seperti MSG untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Pasifik lainnya untuk mendukung gerakan ini. Hubungan etnis yang erat antara Vanuatu dan Papua membuat Vanuatu sangat bersemangat dalam mendukung upaya kemerdekaan Papua. Mereka juga berupaya mempromosikan identitas *Melanesian Renaissance* yang menggambarkan kelahiran kembali suku Melanesia dan bertujuan untuk mengurangi pengaruh asing di wilayah tersebut. Gerakan ini juga mengangkat isu dekolonisasi bagi orang Melanesia yang belum merdeka, yang merupakan faktor utama dalam menarik simpati internasional. (Effendy & Auniy, 2021)

Pengaruh dari gerakan *Melanesian Renaissance* di Papua sangat signifikan. Hal ini dapat memperkuat identitas dan kebudayaan Melanesia di wilayah Papua, namun juga menimbulkan perlawanan dari gerakan separatisme. Gerakan ini memiliki potensi untuk terjatuh ke dalam politik identitas yang seharusnya dihindari. (Pontoh, 2020) Pengenalan istilah "Melanesia" yang pertama kali digunakan oleh Jules Dumont d'Urville juga telah memengaruhi persepsi dan pemahaman tentang identitas dan budaya Papua di tingkat nasional dan internasional. Vanuatu telah secara aktif menyuarkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua di berbagai forum internasional, dengan tujuan mengekspos Indonesia. Mereka telah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pada berbagai kesempatan di PBB, Vanuatu telah mencuatkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan meminta dukungan dari komunitas internasional. (Sabir, 2018) Namun, respons dari pemerintah Indonesia terhadap kritik dan tuntutan Vanuatu masih menjadi perdebatan. Pemerintah Indonesia telah merespon tuduhan tersebut dengan penolakan dan berusaha menjelaskan situasi di Papua dari perspektif yang berbeda. Hubungan antara Indonesia dan Vanuatu dalam konteks Papua masih tegang, dan pembicaraan bilateral resmi antara kedua negara belum terjadi untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. (Ningsih, 2021)

Secara keseluruhan, sebagai negara yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang berpenduduk ras Melanesia, Indonesia tidak dapat mengabaikan gerakan *Melanesian Renaissance* yang terjadi di wilayah tersebut. Bagi orang Melanesia, gerakan ini adalah refleksi perjuangan rakyat Melanesia dalam mempertahankan hak-hak mereka dan lingkungan mereka di tengah tekanan modernitas dan globalisasi. Meskipun

gerakan ini memegang makna penting dari sudut pandang budaya dan etnis, perlu diperhatikan bahwa implikasi politik dan sosial dari upaya pemisahan Papua dari Indonesia juga harus dievaluasi. Upaya untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan di Papua memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah Indonesia, negara-negara Melanesia, dan komunitas internasional.(Aida, 2022)

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, penelitian dengan judul “Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua” oleh Ahmad Sabir. Penelitian ini membahas mengenai diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu sebagai upaya penyelesaian isu separatisme di Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam isu separatisme Papua, dan pencapaian diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam isu Papua.(Sabir, 2018)

Kedua, penelitian dengan judul “Alasan Indonesia Dalam Melakukan Kerja Sama Dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG)” oleh Wirda Wanda Sari Bekarekar. Penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya Indonesia selama ini telah membuahkan hasil yang baik, dan kehadiran Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* juga akan memudahkan terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara, khususnya mengenai isu “Papua Merdeka”. Peningkatan kemampuan diplomasi Indonesia di kancah internasional akan membantu Indonesia mengubah dukungan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* terhadap Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dalam masalah kedaulatan Indonesia. Pemerintah akan lebih mudah memahami bahwa Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Melanesia, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat.(Bekarekar, 2016)

Ketiga, penelitian dengan judul “Peran RI Dalam Menyikapi Vanuatu Pada Gerakan Separatisme Papua” oleh Siti Komariah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dukungan yang kuat dari negara bagian Vanuatu untuk Papua Barat telah menyebabkan konflik yang terbagi antara Indonesia dan Papua. Oknum-oknum aparat Papua yang melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat lalu proses integrasi politik dan sosial belum selesai dan maraknya separatisme politik internasional di pentas diplomatik internasional membuat situasi di Indonesia bagian timur yang semula terisolasi dan tak berdaya, menjadi perhatian dunia internasional.(Komariah, 2022)

Keempat, penelitian dengan judul “Analisis Diplomasi Indonesia Terhadap Vanuatu Terkait Isu Papua Merdeka” oleh Kristin Natalia. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masih terdapat kekurangan dalam implementasi diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu. Indonesia masih belum menggunakan aktor non-negara seperti LSM yang berbasis di Vanuatu, NGO, partai politik gereja, akademisi dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan diplomasi. Meskipun sebelumnya Indonesia telah menjalin hubungan dengan Vanuatu melalui aktor non-negara, hal ini sebenarnya tidak cukup bagi Vanuatu untuk mengurangi dukungannya terhadap kemerdekaan Papua.(K. Natalia, 2021)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini menggunakan strategi pendekatan dan metode pengumpulan data, analisis dan

penafsiran. Pendekatan kualitatif mengandalkan data teks dan gambar, serta memiliki langkah-langkah unik pada analisis data dan memanfaatkan beragam strategi penyelidikan. (Nazir, 2014) Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini memiliki tujuan menjelaskan fenomena dengan detail, melalui pengumpulan data yang rinci. Pada penelitian kualitatif, semakin pada dilakukan penelitian dapat dikatakan kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus pada angka atau nilai pada pengukuran variabelnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

MELANESIAN RENAISSANCE

Gerakan *Melanesian Renaissance* bertujuan memperjuangkan hak dan otonomi nyata bagi rakyat Melanesia dan membangun kembali identitas Melanesia yang terpinggirkan. Ralph R. Premdas melalui jurnalnya yang berjudul "*Melanesian Socialism: Vanuatu's Quest For Self-Definition And Problems Of Implementation*" menjelaskan bahwa menurut Perdana Menteri Vanuatu Walter Lini kebutuhan akan kebangkitan budaya adalah salah satu tugas pertama yang ditetapkan pada rezim Lini. Dia menyerukan "*Melanesian Renaissance*" yang dia gambarkan sebagai "festival roh". *Melanesian Renaissance* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan "kelahiran kembali identitas dan tujuan kita, dan untuk melestarikan tanpa batasan hak yang diberikan Tuhan kita untuk berkembang dengan cara kita sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai dan harapan kita sendiri". *Melanesian Renaissance* bertujuan untuk memberantas pengaruh asing agar menciptakan institusi yang diarahkan dan disetel untuk melayani dan memelihara penciptaan tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang lahir dari lingkungan Vanuatu. (Premdas, n.d.)

Tess Newton Cain, dalam jurnalnya yang berjudul "*The Renaissance of the Melanesian Spearhead Group*" menjelaskan bahwa gerakan *Melanesian Renaissance* mengacu pada upaya bangsa Melanesia untuk memperkuat identitas budaya mereka dan mempromosikan kemakmuran ekonomi, politik dan sosial. Gerakan tersebut melibatkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat hubungan di antara anggota *Melanesia Spearhead Group* (MSG). Salah satu fokus utama *Melanesian Renaissance* adalah untuk meningkatkan dan mempromosikan budaya dan tradisi Melanesia yang kaya dan beragam. Ini melibatkan upaya untuk melestarikan bahasa, seni, ritual, musik, dan praktik pertanian tradisional Melanesia, beberapa yang tertua di dunia. Gerakan ini juga berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kawasan Melanesia dengan mempromosikan kerja sama antar negara anggota MSG di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Melanesia guna memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Gerakan *Melanesian Renaissance* juga melibatkan penguatan identitas dan kebanggaan Melanesia, serta memerangi isu-isu seperti perdagangan manusia, perubahan iklim, dan isu-isu hak asasi manusia. Dengan demikian, gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kedaulatan budaya dan keberlanjutan serta pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip budaya Melanesia. (Cain, 2015)

Konsep tersebut berkembang sebagai respon terhadap dampak kolonialisme, globalisasi, dan modernisasi yang mengancam eksistensi dan kelestarian budaya dan tradisi Melanesia. (Temaluru, 2016) Gerakan tersebut pertama kali muncul pada tahun 1970-an ketika beberapa kelompok radikal di kawasan Melanesia, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon,

Vanuatu, dan Fiji, mulai berorganisasi untuk memperjuangkan hak-hak adat dan pemerintahan sendiri bagi masyarakat Melanesia. Mereka percaya bahwa budaya dan tradisi Melanesia adalah sumber daya berharga yang harus dilestarikan dan orang Melanesia harus memiliki kendali lebih besar atas sumber daya alam dan ekonomi wilayah mereka. (Webb-Gannon & Elmslie, 2014)

Keterkaitan antara *Melanesian Renaissance* dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mencerminkan dampak dan respon pemerintah serta masyarakat Indonesia terhadap inisiatif *Melanesian Renaissance* yang diadvokasi oleh Vanuatu di wilayah Papua. Penelitian ini menggali bagaimana *Melanesian Renaissance* sebagai gerakan budaya dan politik yang muncul di sebagian besar wilayah Melanesia, termasuk Papua, memengaruhi cara pemerintah dan masyarakat Indonesia meresponsnya. Penelitian ini mengkaji apakah *Melanesian Renaissance* telah memicu respons politik, sosial, atau ekonomi di Indonesia, serta apakah perubahan dalam gerakan ini telah memengaruhi cara Indonesia berinteraksi dengan negara-negara Melanesia lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat mengungkapkan dampak diplomasi, upaya diplomasi publik, atau kerja sama regional yang dilakukan oleh Indonesia sebagai tanggapan terhadap kampanye *Melanesian Renaissance* oleh Vanuatu.

DIPLOMASI PUBLIK

Profesor Joseph Nye menerbitkan sebuah buku tentang penggunaan *soft power* dalam diplomasi publik. Dalam bukunya, Profesor Joseph Nye mendefinisikan diplomasi publik sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memobilisasi sumber daya tersebut untuk berkomunikasi dengan publik di negara lain, bukan hanya pemerintah. Profesor Nye menjelaskan dalam bukunya bahwa kekuatan lunak suatu negara bergantung pada budaya, kebijakan, dan nilai suatu negara. Dalam pandangan Nye, *soft power* tidak hanya mampu mempengaruhi dan membuat negara lain bertindak sesuai keinginannya, tetapi juga termasuk mampu menarik perhatian publik. (Nye, 2005)

Salah satu komponen respons akademis terhadap gagasan keamanan modern adalah pertumbuhan diplomasi publik. Studi tentang keamanan dalam politik dunia sedang dalam proses transisi dari realisme ke perspektif neorealis. Ini membahas sumber ancaman, definisi keamanan, penyesuaian respons, penyesuaian siapa yang bertanggung jawab atas keamanan, dan prinsip-prinsip keamanan dasar. Dengan perspektif ini, kita dapat memeriksa bagaimana orang memandang dan bereaksi terhadap masalah dunia saat ini, yang biasanya tidak dikendalikan oleh aktor pemerintah. Partisipasi publik saat ini tersebar luas dan tersebar di antara beberapa peran dalam hal ini.

Ada beberapa perubahan sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi. Aktor diplomatik resmi negara tidak lagi memiliki kontrol eksklusif atas semua kegiatan diplomatik. Menurut Harold Nicholson, perkembangan komunikasi dan teknologi menyebabkan penurunan peran dan fungsi duta besar dan penurunan diplomat menjadi staf administrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh publik dalam diplomasi saat ini tidak dapat dibendung. Diplomasi publik menjadi semakin signifikan karena kompleksitas isu dan hubungan interpersonal, serta dukungan teknologi informasi dan transportasi.

Berdasarkan beberapa definisi diplomasi publik di atas, penulis berpendapat bahwa diplomasi publik adalah upaya negara untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga komunikasi tersebut dapat lebih dipahami oleh

publik. diplomasi publik negara adalah melalui acara, Film, musik, informasi media dan sarana lainnya.

Keterkaitan antara Diplomasi Publik dengan penelitian ini dapat dilihat dari terletak pada bagaimana Diplomasi Publik dapat menjadi alat yang penting dalam mengelola respon pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap isu *Melanesian Renaissance* yang melibatkan Provinsi Papua. Diplomasi Publik melibatkan upaya pemerintah dalam memahami dan merespon tindakan serta kampanye internasional yang berdampak pada citra dan hubungan luar negeri negara. Dalam konteks penelitian ini, Diplomasi Publik dapat membantu pemerintah Indonesia dalam memahami perasaan, pandangan, dan kepentingan masyarakat serta mengkomunikasikan responsnya secara efektif. Penelitian ini memeriksa bagaimana respon pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap *Melanesian Renaissance* dipengaruhi oleh upaya Diplomasi Publik, seperti langkah-langkah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan posisi dan tindakan mereka terhadap kampanye tersebut. Diplomasi Publik juga dapat berperan dalam mempengaruhi persepsi internasional tentang isu ini dan membantu mengelola dampaknya terhadap hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia seperti Vanuatu. Oleh karena itu, keterkaitan antara Diplomasi Publik dan penelitian ini terletak pada peran Diplomasi Publik dalam membentuk dan mempengaruhi respon Indonesia terhadap isu *Melanesian Renaissance* yang berkaitan dengan Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENYEBAB KONFLIK DI PAPUA

Konflik di Papua yang melibatkan tuntutan kemerdekaan dari Indonesia adalah masalah kompleks yang melibatkan sejumlah faktor. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi konflik tersebut mencakup:

1. Konteks Sejarah: Konflik Papua berakar dalam perselisihan sejarah sejak masa penjajahan, ketika status Papua menjadi sumber perselisihan antara Belanda dan Indonesia. Meskipun Papua secara resmi bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, persengketaan atas status politiknya belum terselesaikan sepenuhnya. (*History of West Papua*, n.d.)
2. Identitas Budaya dan Etnis Papua: Papua memiliki beragam kelompok etnis dan bahasa yang berbeda, dengan banyak masyarakat Papua yang merasa memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mempertahankan akar budaya mereka. (Satre & Lord, 2022)
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam: Papua adalah wilayah kaya sumber daya alam, seperti tambang emas, tembaga, gas alam, dan hutan hujan. Namun, eksploitasi sumber daya alam ini telah menimbulkan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, yang merasa manfaatnya tidak merata. (Andriansyah et al., 2018)
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Terdapat laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius selama konflik di Papua, termasuk penindasan politik, tindakan keras oleh aparat keamanan, dan perlakuan buruk terhadap warga sipil. (ICP Secretariat, 2021)
5. Dinamika Terkini: Konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan beberapa kelompok separatis bersenjata. Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasi konflik ini melalui berbagai upaya, termasuk pembangunan ekonomi

dan sosial, serta upaya dialog, namun upayanya seringkali menghadapi hambatan.(Permana, 2021)

KAMPANYE MELANESIAN RENAISSANCE VANUATU DI PAPUA

Papua adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur pulau Papua dan memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Papua termasuk dalam kawasan Melanesia yang memiliki konsep solidaritas Melanesia yang mengacu pada ikatan bersama antara orang-orang Melanesia, termasuk yang tinggal di Papua dan Vanuatu, berdasarkan kesamaan budaya, sejarah, dan bahasa. Vanuatu telah menunjukkan dukungan kuat terhadap Papua dan secara rutin menyuarakan isu-isu terkait Papua di forum internasional.(Sadeli, 2021) Namun, sikap Vanuatu ini juga mendapat kritik dari Indonesia yang melihatnya sebagai dukungan untuk separatisme di Papua. Gerakan Solidaritas Melanesia memiliki pandangan yang berbeda, dengan beberapa mendukung referendum dan intervensi asing, sementara yang lain mendesak dukungan untuk hak menentukan nasib sendiri bagi penduduk Papua.(Budiman, 2019) Situasi hak asasi manusia di Papua menjadi perhatian internasional dengan laporan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.(*Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia Dan Situasi Konflik*, 2023) Negara-negara Melanesia menghadapi tantangan dalam mendukung Papua, termasuk tekanan politik dari Indonesia. Vanuatu mengukung kampanye *Melanesian Renaissance* untuk dekolonisasi dan kemerdekaan wilayah Melanesia yang belum merdeka, termasuk Papua, dengan berbagai upaya diplomasi dan dukungan politik, termasuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Vanuatu menggunakan pendekatan verbal dan diplomasi untuk mempengaruhi opini publik internasional dan organisasi regional guna mendukung upaya ini.(K. Natalia, 2021)

Peran Vanuatu dan Bentuk-bentuknya

Vanuatu memainkan peran penting dalam mewujudkan kampanye *Melanesian Renaissance* dan mendukung kemerdekaan Papua. Hal ini mencerminkan pemanfaatan isu HAM dan hubungan antara negara-negara Melanesia untuk memperoleh kekuatan strategis. Vanuatu juga mendasari tindakannya pada prinsip "*Melanesian Way*," yang merupakan konsep budaya dan filosofi yang mewarnai kehidupan masyarakat Melanesia. Prinsip "*Melanesian Way*" menekankan hubungan antara individu, masyarakat, dan lingkungan alam mereka. Dalam konteks ini, "*Melanesian Renaissance*" adalah periode perkembangan budaya dan gerakan politik di Melanesia yang muncul pada pertengahan abad ke-20 dengan fokus pada perubahan sosial dan politik. Vanuatu berusaha untuk mempengaruhi opini publik internasional dan organisasi regional guna mendukung kemerdekaan Papua melalui diplomasi dan dukungan politik. Kepentingan Vanuatu dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri dan orientasi kekuasaan, yang mengarah pada dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua. Vanuatu telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam kampanye *Melanesian Renaissance*, termasuk membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain dan mendapat dukungan finansial.(Temaluru, 2016) Aktivitas diplomasi Vanuatu melibatkan partisipasi dalam forum internasional, seperti *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dan konferensi PBB, serta pernyataan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dalam forum tersebut. Moana Kalosil, seorang pejabat Vanuatu, sangat vokal dalam mendukung Papua Merdeka dan mendesak penyelidikan

pelanggaran HAM di Papua. (*Vanuatu Pushes UN to Investigate Allegations of Rights Abuses in Papua*, 2014)

Pengaruh atau Dampak yang Diakibatkan

Usaha kampanye *Melanesian Renaissance* memiliki dampak yang signifikan dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, khususnya terkait Papua dan Vanuatu. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa dampak yang diakibatkan oleh kampanye ini.

1. Pengaruh dalam Diplomasi: Kampanye *Melanesian Renaissance* memiliki pengaruh signifikan dalam diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu. Faktor utama yang memengaruhi ini adalah doktrin *Melanesian Renaissance*, yang menguatkan solidaritas antara etnis Melanesia di Papua dan Vanuatu. Doktrin ini mempersulit upaya Indonesia memengaruhi sikap politik Vanuatu, terutama terkait isu Papua. (Sabir, 2018)
2. Dukungan terhadap Kemerdekaan Papua: Dukungan Vanuatu terhadap perjuangan kemerdekaan Papua menciptakan ketegangan dalam diplomasi internasional. Kedekatan etnis Melanesia antara Vanuatu dan Papua memainkan peran kunci dalam dukungan ini, dan Vanuatu adalah salah satu negara pertama yang mengakui Papua sebagai negara merdeka. Ini mencerminkan rasa persaudaraan antar etnis Melanesia. (Kusuma, 2021)
3. Gerakan Separatis Papua: Kampanye *Melanesian Renaissance* telah menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Gerakan ini mencoba mempromosikan kesadaran etnis Melanesia di Papua dan wilayah-wilayah sekitarnya, dan dalam beberapa kasus, digunakan sebagai alat politik oleh beberapa kelompok separatis di Papua. Ketidakpuasan masyarakat Papua mencakup isu-isu politik, ekonomi, HAM, dan aspirasi untuk otonomi atau kemerdekaan yang lebih besar. (Harianja, 2020)

Respon masyarakat Papua terhadap kampanye *Melanesian Renaissance* bervariasi, dan dapat dibagi menjadi beberapa pola umum:

1. Dukungan terhadap Identitas Melanesia: Sebagian masyarakat Papua merasa terhubung secara kuat dengan identitas Melanesia dan mendukung kampanye ini untuk mempertahankan akar budaya mereka. (Keesing, 2023)
2. Penyadaran Politik dan Partisipasi: Kampanye ini telah membangkitkan kesadaran politik dan beberapa orang Papua melihatnya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengadvokasi perubahan dalam hubungan dengan pemerintah Indonesia. (*The Current Status Of The Papuan Pro-Independence Movement*, 2015)
3. Kritik terhadap Respons Pemerintah Indonesia: Sebagian masyarakat Papua mengkritik respons pemerintah Indonesia terhadap kampanye ini, merasa bahwa pemerintah kurang responsif dan sering kali menanggapi isu ini dengan tindakan keras. (Laurence, 2022)
4. Kekhawatiran akan Keamanan dan Stabilitas: Ada kekhawatiran di kalangan beberapa masyarakat Papua tentang dampak kampanye ini terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah mereka. (Strangio, 2021)
5. Perbedaan Pendapat di Antara Masyarakat Papua: Ada perbedaan pendapat dalam masyarakat Papua terkait kampanye ini, mencerminkan keragaman sudut pandang dan tujuan di antara masyarakat Papua. (Blades, 2020)
6. Hubungan dengan Negara Melanesia: Masyarakat Papua dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait hubungan dengan negara Melanesia seperti Vanuatu, dengan

beberapa mendukung hubungan semacam itu dan yang lainnya lebih skeptis.(Darmawan, 2022)

7. Pengaruh Kelompok Separatis: Kelompok separatis di Papua dapat memengaruhi respon masyarakat terhadap kampanye ini, dengan sebagian mendukung dan yang lain merasa khawatir terkait tindakan kelompok separatis.(Perkasa & Satria, 2021)

RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP *MELANESIAN RENAISSANCE* OLEH VANUATU

Pada tahun 2022, parlemen Indonesia menyetujui pembentukan tiga provinsi baru di wilayah Papua, sehingga total provinsi di Papua menjadi enam yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.(D. L. Natalia, 2022) Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, pembentukan provinsi-provinsi baru ini juga memicu kritik dan kekhawatiran. Beberapa pihak merasa bahwa hal ini dapat merusak kedudukan penduduk asli Papua dan mengancam otonomi khusus. Ada juga kekhawatiran bahwa perubahan administratif ini dapat memperburuk konflik di wilayah tersebut, yang telah berlangsung selama beberapa dekade.(Waty et al., 2022) Meskipun pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pembentukan provinsi-provinsi baru ini akan mendukung pembangunan dan stabilitas, isu ini tetap kompleks dan kontroversial, dengan dampaknya terhadap konflik separatisme perlu dipantau dengan cermat.

Respon Indonesia terhadap Kampanye *Melanesian Renaissance* yang diprakarsai oleh Vanuatu mencakup beberapa tindakan dan strategi yang melibatkan diplomasi, diplomasi budaya, upaya untuk meningkatkan kerja sama dengan Vanuatu, diplomasi publik, kritik terhadap klaim Vanuatu, pendekatan humanis, dan dialog dengan kelompok Papua yang mendukung kampanye tersebut. Diplomasi melibatkan respons tegas terhadap kritik Vanuatu terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua di forum internasional(Yanwardhana, 2021), sementara diplomasi budaya melibatkan *Melanesian Culture Festival* dan upaya untuk mempromosikan budaya Melanesia.(*Festival Budaya Melanesia 2015*, 2015) Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan di Vanuatu dan menjelaskan posisinya terkait Papua.(Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, 2021) Diplomasi dan dialog adalah bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas di Papua sambil memastikan hak dan kesejahteraan rakyat Papua diperhatikan.(Komariah, 2022) Pendekatan humanis mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat Papua serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.(Chairil, 2020) Ini adalah pendekatan jangka panjang yang menekankan dialog, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat Papua. Keseluruhan respons Indonesia mencerminkan tekad untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dan mencari solusi yang berkelanjutan terhadap isu Papua.

Lalu pemerintah Indonesia juga merespons kampanye *Melanesian Renaissance* di Papua dengan berbagai tindakan yang menekankan kedaulatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Papua. Beberapa tindakan tersebut termasuk pembangunan infrastruktur di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan konektivitas wilayah

tersebut.(Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2023) Selain itu, Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan Papua kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri.(DATABASE PERATURAN JDIH BPK, n.d.) Program pendidikan dan kesehatan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), dan upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi juga diperluas melalui program pelatihan dan dukungan kepada UMKM.(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023) Semua tindakan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Papua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

KESIMPULAN

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, alasan Vanuatu memelopori kampanye *Melanesian Renaissance* di Papua adalah adanya kesamaan etnis yaitu ras Melanesia. Selain itu, dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua juga tertuang dalam konstitusi negaranya, seperti yang diharapkan oleh Walter Lini, perdana menteri pertama Vanuatu. Ia mengatakan selama orang-orang Melanesia masih ada yang hidup dalam penjajahan, maka Vanuatu tidak sepenuhnya merdeka. Berdasarkan konsep ini, Vanuatu kemudian secara aktif dan terbuka menyatakan dukungannya terhadap Papua. Vanuatu telah menyuarakan suaranya untuk kemerdekaan Papua di forum internasional seperti PBB. Vanuatu telah mengangkat isu Papua di Majelis Umum PBB mulai tahun 2013 dan terakhir pada tahun 2020. Tidak hanya PBB, Vanuatu juga menjadi salah satu penggagas organisasi regional MSG yang bertujuan untuk mendekolonisasi dan meliberalisasi negara-negara Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial, khususnya kawasan Pasifik Selatan. Pada tahun 2014, dengan dukungan Vanuatu, kelompok gerakan kemerdekaan Papua Barat ULMWP didirikan. Mengingat dukungan Vanuatu yang konsisten dan serius terhadap kemerdekaan Papua, walaupun Indonesia telah melakukan beberapa pendekatan kepada Vanuatu melalui berbagai macam cara seperti diplomasi/dialog, kritik terhadap klaim Vanuatu atas tindakannya di Papua, pendekatan humanis, manajemen berita dan serta diplomasi kebudayaan terhadap Vanuatu seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, namun sampai saat ini Indonesia dan Vanuatu belum juga melakukan pertemuan bilateral secara resmi untuk berdialog mengenai kampanye *Melanesian Renaissance*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui penelitian literatur, penulis menemukan bahwa diplomasi Indonesia kurang aktif dan konsisten, penulis berpendapat bahwa Indonesia harus melakukan diplomasi dengan Vanuatu setiap tahunnya. Apa pun bentuk diplomasi yang diambil, setidaknya sebagian dari apa yang dilakukan Indonesia diharapkan akan secara perlahan mengubah persepsi Vanuatu terhadap Indonesia. Indonesia juga harus terus mendekati diri ke Vanuatu, hal ini merupakan cara yang tepat untuk mengungkapkan sikap Indonesia bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan negara. Jika diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu sebelumnya sehubungan dengan kampanye *Melanesian Renaissance* tidak membuahkan hasil yang optimal, penulis berpendapat bahwa Indonesia dapat merangkul pihak-pihak dari Vanuatu dan pihak-pihak dari Papua secara bersamaan, sehingga dapat menciptakan persepsi positif terhadap Indonesia mengingat mengingat bahwa hubungan yang dimiliki antara

Vanuatu dengan masyarakat Papua pro merdeka cukup erat. Dengan cara ini, diplomasi dapat dilakukan secara efektif.

REFERENSI

- Aida, N. R. (2022). *Mengenal Apa Itu Melanesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/05/180100465/mengenal-apa-itu-melanesia?page=all#page4>
- Andriansyah, M. N., Firmansyah, R., Wijaya, A., & Chitra, J. (2018). *Indonesia's Last Forest Frontier: 3 Facts to Know About Papua*. World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/indonesias-last-forest-frontier-3-facts-know-about-papua>
- Bekarekar, W. W. S. (2016). *Alasan Indonesia dalam Melakukan Kerja Sama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG)* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8608>
- Blades, J. (2020). *West Papua: The Issue That Won't Go Away for Melanesia*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/publications/west-papua-issue-won-t-go-away-melanesia>
- Budiman, B. (2019). *Papua Terkini - Solidaritas Melanesia tolak referendum Papua*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/1037598/papua-terkini-solidaritas-melanesia-tolak-referendum-papua>
- Cain, T. N. (2015). *The Renaissance of the Melanesian Spearhead Group*. https://www.researchgate.net/publication/318320780_The_Renaissance_of_the_Melanesian_Spearhead_Group
- Chairil, T. (2020). Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis. *CBDS Commentaries*. <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>
- Darmawan, A. R. (2022). *Why Indonesia's engagement with Pacific countries matters*. The Interpreter. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-indonesia-s-engagement-pacific-countries-matters>
- DATABASE PERATURAN JDIH BPK. (n.d.). *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Retrieved October 3, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>
- Effendy, M., & Auniy, T. (2021). *Papua, Vanuatu dan Indonesia*. Sinergi Linear. <https://sinergilinear.com/papua-vanuatu-dan-indonesia/>
- Festival Budaya Melanesia 2015*. (2015). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/festival-budaya-melanesia-2015/>
- Harianja, A. (2020). *Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua*. Pusat Studi Kemanusiaan Dan Pembangunan. <https://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>
- History of West Papua*. (n.d.). International Academics for West Papua. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.academicsforpapua.org/history-of-west-papua>
- ICP Sekretariat. (2021). Human Rights In West Papua. *International Coalition for Papua*. <https://humanrightspapua.org/wp-content/uploads/2021/12/HumanRightsPapua2021-ICP.pdf>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. (2021). *Rencana Strategis KBRI Canberra 2020-2024*. Kementerian Luar Negeri Indonesia. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9SZW5zdHJhJTlwS0JSSUyMENhbmJlcnJhJTlwMjAyMC0yMDI0LnBkZg==>
- Keesing, R. M. (2023). *Melanesian Culture*. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Melanesia>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Mendukung Pemberdayaan UMKM Provinsi Papua*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papualuku/baca->

- berita/32143/Penandatanganan-Pernyataan-Komitmen-Bersama-Mendukung-Pemberdayaan-UMKM-Provinsi-Papua.html
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2023). *Kementerian PUPR Tuntaskan 47 Proyek Strategis Nasional pada 2023-2024*. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-tuntaskan-47-proyek-strategis-nasional-pada-2023-2024>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Mendikbud: Perlu Sinergi dalam Membangun Pendidikan di Papua dan Papua Barat*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/mendikbud-perlu-sinergi-dalam-membangun-pendidikan-di-papua-dan-papua-barat>
- Komariah, S. (2022). Peran RI dalam Menyikapi Vanuatu pada Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.153-162>
- Kusuma, P. D. (2021). Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua. *Pena Wimaya*, 2. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jpw/article/view/4967>
- Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik*. (2023). Human Rights Monitor. <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/tanah-papua-2022/>
- Laurence, J. (2022). *Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid*. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/indonesia-un-experts-sound-alarm-serious-papua-abuses-call-urgent-aid>
- Natalia, D. L. (2022). *Dimekarkan Jadi 6 Provinsi, Wapres: Papua Tetap Satu, Tidak Dipecah-pecah*. INews Papua. <https://papua.inews.id/berita/dimekarkan-jadi-6-provinsi-wapres-papua-tetap-satu-tidak-dipecah-pecah#:~:text=Wakil Presiden Ma%27ruf Amin menegaskan%2C Papua tetap satu,Daya%2C Papua Tengah%2C Papua Selatan dan Papua Pegunungan>
- Natalia, K. (2021). *Analisis Diplomasi Indonesia Terhadap Vanuatu Terkait Isu Papua Merdeka*. https://repository.usni.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1902&keywords=analisis+diplomasi+indonesia
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ningsih, W. L. (2021). *Pengaruh Renaissance bagi Indonesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/22/150000679/pengaruh-renaissance-bagi-indonesia>
- Nye, J. S. (2005). *Soft Power The Means To Success In World Politics*. New York: Public Affairs.
- Perkasa, V. D., & Satria, A. (2021). *Conflict Resolution in Papua and the Label of Terrorism*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/05/conflict-resolution-in-papua-and-the-label-of-terrorism/>
- Permana, E. (2021). *Indonesia designates Papuan separatists as terrorist*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesia-designates-papuan-separatists-as-terrorist/2224135>
- Pontoh, C. H. (2020). *Rasisme, Politik Identitas dan Masalah Papua: Sebuah Penjelasan*. Indo Progress. <https://indoprogress.com/2020/06/rasisme-politik-identitas-dan-masalah-papua-sebuah-penjelasan/>
- Premdas, R. R. (n.d.). *Melanesian Socialism: Vanuatu's Quest for Self-Definition and Problems of Implementation*. Vol. 11 (1987): *Pacific Studies Full Issue 1*. <http://lir.byuh.edu/index.php/pacific/article/view/2646>
- Redaksi CNN Indonesia. (2019). *Perjanjian New York 1962 dan Pangkal Kisruh di Tanah Papua*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820184732-20-423159/perjanjian-new-york-1962-dan-pangkal-kisruh-di-tanah-papua>
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung

- Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>
- Sadeli, H. (2021). *Vanuatu dan Sentimen Anti-Indonesia*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/03/08000011/vanuatu-dan-sentimen-anti-indonesia>
- Satre, J., & Lord, D. (2022). *Papuan Independence and Political Disorder in Indonesia*. ACLED. <https://acleddata.com/2022/10/05/papuan-independence-and-political-disorder-in-indonesia/>
- Strangio, S. (2021). *Indonesia Deploys Forces to Troubled Papua Region*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/05/indonesia-deploys-special-forces-to-troubled-papua-region/>
- Temaluru, T. B. P. (2016). *Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/41370/>
- The Current Status Of The Papuan Pro-Independence Movement*. (2015). Institute for Policy Analysis of Conflict. <https://understandingconflict.org/en/publications/The-Current-Status-of-the-Papuan-Pro-Independence-Movement>
- Vanuatu pushes UN to investigate allegations of rights abuses in Papua*. (2014). ABC News. https://www.abc.net.au/news/2014-03-05/vanautu-urges-human-rights-investigation/5301270?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web
- Waty, R. R., Mirza, I. M., & Fadli, N. M. (2022). Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11953>
- Webb-Gannon, C., & Elmslie, J. (2014). MSG Headache, West Papuan Heartache? Indonesia's Melanesian Foray. *The Asia-Pacific Journal*, 12(47). <https://apjif.org/-Camellia-Webb-Gannon--Jim-Elmslie/4225/article.pdf>
- Yanwardhana, E. (2021). *Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210926132354-4-279234/kronologi-vanuatu-serang-ri-di-pbb-sebut-sebut-papua>